

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, *Pra Peradilan dan KUHAP* (Jakarta: Diadit Media, 2015)
- Amdani, Yusi, “Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016
- Bagir Manan, 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2017)
- Bayunugraha, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP,” *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Univ.Brawijaya, 2015
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, ed. oleh Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, dan Indro Basuki (Malang: Bayumedia Publishing, 2014)
- Djohansyah, 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2017)
- Enschede, Ch.J-A., 1974. *Beginselen van strafrecht*.Deventer:Uitg.Kluwer B.V. dalam Andi Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia &*

- Perkembangannya*, ed. oleh Sophia Hadyanto (Jakarta: PT.Softmedia, Jakarta, 2012)
- H.A.K.Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, dan Sunanto, *Praperadilan* (Jakarta: IND-HIL-CO, 1989)
- Hakim, Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan, 1999. *Filsafat Hukum dalam Tanya Jawab, Rajawali Pers, Jakarta dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2017)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, ed. oleh Sophia Hadyanto (Jakarta: PT.Softmedia, Jakarta, 2012)
- Hikmoro, Abi, “Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Univ.Atma Jaya Yogyakarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14* (Indonesia, 1983)
- , *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15* (Indonesia, 1983)
- Manan, Bagir, dan Kunta Magnar, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2017)
- Muhammad, Rusli, 2009. *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan*

Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggungjawab, Jurnal Hukum No.4, Vol.16 dalam dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum (Bandung: Nusamedia, 2017)

Muslimin, Mokhamad, "Fungsi dan Kewenangan Praperadilan," *Pandecta: Research Law Journal*, 6. Januari 2011

Nurudin, Agus, 2010. *Tereduksinya Kebebasan Hakim, Opini Suara Merdeka dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2017)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, *Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia, 1983)

Prasetyo, Teguh, 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta dalam Dahlan Sinaga, Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2017)

Purwanto, M Jafar, Nyoman Serikat, Putra Jaya, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, et al., "Kajian Yuridis Disparitas Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dan 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Review*, 5 (2016)

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, ed. oleh Aloysius Soni (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2010)

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945* (Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia, 1945)
- , *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Indonesia: LN No.134 Tahun 2001, TLN No.4150, 2001)
- , *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (Indonesia: LN No.75 Tahun 1999, TLN No.3851, 1999)
- , *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian* (Indonesia: LN No.169 Tahun 1999, TLN No.3890, 1999)
- , *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia: LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, 2009)
- , *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Indonesia: LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3258, 1981)
- Simon, D., 1941. *Leerboek van het Nederlansche strafrecht., I.Bijgewerkt door W.P.J.Pompe. dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, ed. oleh Sophia Hadyanto (Jakarta: PT.Softmedia, Jakarta, 2012)
- Sutatiek, Sri, 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta dalam Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusamedia,

2017)

Wahyu, “Penemuan Hukum Progresif dalam Proses Peradilan Pidana,” *Tadulako*

Law Review, Volume 1.Issue 2, Desember 2016

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U